



Analisis Framing Netizen Di X Dalam Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis

Analysis of Netizen Framing in X in the Implementation of the Free Nutritious Meal Program

Haryati¹, Nursapia Harahap²

¹²Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan

Email: haryati0603212125@uinsu.ac.id, nursapiaharahap@uinsu.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana framing netizen di platform X terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) jika dibandingkan dengan pandangan siswa sebagai penerima manfaat langsung. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif, dengan metode analisis framing model Pan dan Kosicki untuk menelaah 50 unggahan netizen terkait program MBG, serta wawancara mendalam dengan 12 siswa penerima program sebagai pembandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa netizen cenderung memframing program MBG secara negatif, dengan narasi bahwa program ini membebani anggaran negara, menguntungkan pihak ketiga, kurang efisien dibanding bantuan tunai, serta menyajikan makanan yang dianggap tidak memenuhi standar gizi. Sebaliknya, wawancara dengan siswa menunjukkan respons yang lebih positif; sebagian besar merasa terbantu secara ekonomi dan mengapresiasi keberadaan program ini, meskipun mengemukakan beberapa catatan terhadap kualitas makanan dan aspek teknis pelaksanaan. Ketidaksesuaian antara opini netizen dan pengalaman langsung siswa mengindikasikan adanya gap persepsi antara ruang digital dan realitas di lapangan. Temuan ini menegaskan pentingnya pengelolaan komunikasi publik yang berbasis data, pengalaman, dan keterlibatan audiens agar kebijakan sosial seperti MBG dapat dipahami secara lebih utuh dan proporsional.

Kata kunci: Framing; Netizen; Media Sosial; Program Makan Bergizi Gratis; Persepsi Publik.

Abstract

This study aims to analyze how netizens on platform X frame the Free Nutritious Meal Program (MBG) compared to the views of students as direct beneficiaries. The approach used is qualitative, using the Pan and Kosicki framing analysis model to examine 50 netizen posts related to the MBG program, as well as in-depth interviews with 12 student recipients of the program as a comparison. The results of the study show that netizens tend to frame the MBG program negatively, with the narrative that this program burdens the state budget, benefits third parties, is less efficient than cash assistance, and serves food that is considered not to meet nutritional standards. In contrast, interviews with students showed a more positive response; most felt economically helped and appreciated the existence of this program, although they expressed some notes on the quality of the food and technical aspects of the implementation. The discrepancy between netizens' opinions and students' direct experiences indicates a perception gap between digital space and reality on the ground. These findings emphasize the importance of managing public communication based on data, experience, and audience involvement so that social policies such as MBG can be understood more completely and proportionally.

Keywords: Framing; Netizens; Social Media; Free Nutritious Meal Program; Public Perception.

I. PENDAHULUAN

Media sosial telah bertransformasi menjadi ruang diskusi publik yang memengaruhi cara masyarakat memahami dan merespons kebijakan pemerintah. Salah satu kebijakan yang mendapat sorotan luas adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang bertujuan meningkatkan asupan gizi anak-anak, remaja, dan kelompok rentan sebagai upaya menurunkan angka stunting dan malnutrisi. Meski memiliki tujuan mulia, kebijakan ini memunculkan respons beragam di media sosial, khususnya di platform X, yang dikenal sebagai ruang diskusi yang dinamis dan sering kali penuh konfrontasi opini.

Dalam konteks ini, framing menjadi konsep penting untuk memahami bagaimana wacana tentang MBG dikonstruksi. Konsep framing dalam komunikasi massa menjelaskan bagaimana isu dikemas dengan bahasa, simbol, dan narasi tertentu agar membentuk interpretasi spesifik di benak audiens (Entman, 1993). Tidak hanya media arus utama, aktor-aktor di media sosial seperti netizen juga turut membingkai isu melalui unggahan, komentar, meme, dan retweet. Mereka tidak sekadar menjadi konsumen informasi, tetapi juga produsen narasi yang memengaruhi opini publik secara kolektif.

Framing terhadap MBG setidaknya mengerucut pada tiga aspek utama: efektivitas pelaksanaan program, transparansi dan akuntabilitas anggaran, serta dugaan politisasi kebijakan. Sebagian netizen memuji MBG sebagai solusi terhadap ketimpangan gizi, sementara lainnya mengkritiknya sebagai proyek politis menjelang pemilu, menyangsikan kualitas pelaksanaan dan potensi penyalahgunaan dana. Beberapa studi sebelumnya (Wibowo, 2021; Nugroho et al., 2020; Yusuf, 2022) telah menunjukkan bahwa framing di media sosial sangat berpengaruh terhadap legitimasi dan efektivitas kebijakan, bahkan sering kali lebih mencerminkan afiliasi politik dibanding fakta kebijakan itu sendiri.

Di sisi lain, secara global kebijakan serupa telah menunjukkan hasil yang signifikan. Di Inggris dan Korea Selatan, program makan gratis terbukti mendukung kesehatan dan prestasi siswa, dengan catatan pentingnya transparansi dan netralitas politik (Morgan & Taylor, 2018; Kim & Lee, 2019). Di Indonesia, program seperti Aksi Bergizi yang didukung UNICEF menjadi pelengkap penting dalam membangun pemahaman menyeluruh terkait pentingnya gizi (Febria, Nugrahmi, & Mariyona, 2023). Selain dimensi teknis dan edukatif, MBG juga dapat dimaknai sebagai implementasi nilai-nilai sosial dan spiritual, seperti anjuran memberi makan dalam Al-Qur'an dan hadis, yang menggarisbawahi pentingnya kualitas, keikhlasan, dan kebermanfaatannya.

MBG juga memiliki nilai strategis dalam memperkuat legitimasi pemerintah di tengah fluktuasi kepercayaan publik. Oleh karena itu, analisis terhadap framing digital menjadi penting, tidak hanya sebagai cerminan opini publik, tetapi juga sebagai masukan dalam membentuk komunikasi kebijakan yang adaptif dan partisipatif. Penelitian ini bertujuan mengetahui framing netizen di platform X terhadap Program Makan Bergizi Gratis dibentuk dan mengetahui perbedaan antara framing digital tersebut dengan pengalaman langsung siswa

sebagai penerima manfaat program Dengan pendekatan ini, studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam kajian komunikasi digital dan kebijakan publik, sekaligus menawarkan masukan praktis bagi pemerintah dalam merancang strategi komunikasi yang lebih efektif dan responsif terhadap persepsi masyarakat.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis isi untuk memahami bagaimana framing netizen di platform X terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dibentuk dan dikonstruksikan. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti menggali secara mendalam konteks sosial, narasi, serta makna yang tersembunyi di balik unggahan netizen, yang tidak dapat dijangkau hanya melalui metode kuantitatif (Nursapia, 2020). Pendekatan kualitatif dianggap relevan karena dapat menangkap bahasa, simbol, dan konteks sosiopolitik yang melingkupi praktik komunikasi di media sosial (Bogdan & Taylor, 1982; Widiawati, 2020).

Penelitian dilakukan secara daring (online) dengan lokasi virtual di media sosial platform X (sebelumnya Twitter). Pengumpulan data berlangsung selama satu bulan, yakni dari tanggal 1 April hingga 30 April 2025. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder:

Data Primer:

Sebanyak 350 unggahan netizen (tweet, reply, quote-retweet) yang membahas program MBG, dikumpulkan berdasarkan kata kunci: “makan bergizi gratis”, “makan gratis”, “program makan gratis”, dan variasinya. Wawancara semiterstruktur dengan 5 narasumber yang aktif dalam diskursus media sosial atau memiliki latar belakang akademik serta aktivisme terkait kebijakan publik.

Data Sekunder:

Artikel berita daring dari media nasional. Dokumen resmi pemerintah terkait program MBG. Publikasi ilmiah yang relevan dengan isu framing dan kebijakan sosial.

Teknik Pengumpulan Data

Analisis Isi Media Sosial: Peneliti melakukan observasi non-partisipatif terhadap unggahan di platform X menggunakan fitur pencarian dan hashtag. Teknik web scraping digunakan untuk mengunduh dan mendokumentasikan data secara sistematis. Data yang dikumpulkan didokumentasikan dalam bentuk tangkapan layar, catatan teks, serta metadata (tanggal, akun, jumlah interaksi).

Wawancara Semiterstruktur:

Wawancara dilakukan secara daring melalui platform komunikasi seperti Zoom dan WhatsApp. Hasil wawancara direkam, ditranskrip, dan dianalisis secara tematik.

Teknik Analisis Data

Analisis dilakukan dengan menggunakan metode analisis framing, mengacu pada model framing dari Entman (1993) yang meliputi: problem

definition, causal interpretation, moral evaluation, dan treatment recommendation. Peneliti mengidentifikasi: Tema dominan yang muncul (positif/negatif). Bahasa atau simbol yang digunakan. Aktor yang sering muncul dalam narasi. Evaluasi publik terhadap program MBG. Hasil analisis isi kemudian dibandingkan dengan temuan dari wawancara untuk mengidentifikasi konsistensi atau perbedaan dalam framing.

Validitas Data

Untuk menjaga validitas, peneliti menggunakan teknik triangulasi: Triangulasi sumber: Membandingkan unggahan dari berbagai akun (resmi dan individu), media berita, dan hasil wawancara. Triangulasi teori: Menggabungkan teori framing (Entman), komunikasi publik, dan pendekatan spiritualitas sosial sebagai landasan analisis. Triangulasi metode: Menggabungkan analisis isi dan wawancara semiterstruktur sebagai dua teknik utama untuk menjamin kedalaman dan ketepatan interpretasi data (Saadah et al., 2022).

Keterbatasan Penelitian ini terbatas pada platform X saja dan tidak mencakup platform lain seperti Instagram, TikTok, atau Facebook, yang mungkin memiliki dinamika naratif berbeda. Selain itu, jumlah narasumber wawancara relatif terbatas, dan tidak dilakukan observasi langsung terhadap latar sosial narasumber.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan persepsi netizen di media sosial, khususnya platform X, terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan pengalaman langsung para siswa sebagai penerima manfaat program tersebut. Dinamika pendapat netizen terlihat tajam, mencerminkan polarisasi opini publik dalam era digital. Gambar 1 dan Gambar 2 merupakan visualisasi unggahan dari platform X yang memperlihatkan reaksi negatif dan positif netizen. Namun, dalam naskah ini, visual tersebut juga dijelaskan secara naratif untuk memperjelas konteks dan isi pesan yang dimaksud.



Gambar 1. Unggahan Komentar Negatif Platform X Gambar ini menampilkan unggahan dari akun @JurnalAspirasi dan @RambeManis @JurnalAspirasi dan @RambeManis yang secara kritis menyoroti Program MBG. Akun

@JurnalAspirasi menuliskan komentar bernada skeptis terhadap dana Rp10.000 per anak yang dinilai tidak cukup untuk makanan bergizi, serta menyebutkan potensi korupsi dengan menyatakan program ini berpotensi jadi "ladang bancaan korupsi." Akun *@RambeManis* menyarankan agar program difokuskan pada anak dari keluarga miskin, dan menilai makanan di rumah lebih bergizi.

Netizen di platform X menyampaikan berbagai reaksi yang cukup tajam terhadap program MBG. Akun *@JurnalAspirasi*, misalnya, dalam unggahan tanggal 7 Januari menuliskan, "Bergizi apaan, dg uang Rp. 10000 (?), ini akal² an. Banyak keluhan para murid ttg MBG, rasanya tak enak." Dalam cuitan tersebut, netizen menyoroti keterbatasan dana sebesar Rp10.000 per anak yang dianggap tidak cukup untuk menyediakan makanan yang benar-benar bergizi. Lebih jauh lagi, akun tersebut juga menyebutkan potensi korupsi dalam program ini, "Rp. 71 Triliun, & mungkin makin meningkat, dikemudian hari, dari awal saja MBG ini tak berkualitas, apalagi nanti. Ini berpotensi, jadi ladang bancaan korupsi." Unggahan ini memperlihatkan kekhawatiran akan ketidakefisienan alokasi anggaran negara yang sangat besar untuk program ini. Nada skeptis yang sama juga datang dari akun lain bernama *@RambeManis*, yang menyatakan bahwa makanan di rumah jauh lebih bergizi dibandingkan dengan makanan dari program MBG. Ia menilai bahwa program ini sebaiknya difokuskan secara parsial pada anak-anak dari keluarga miskin yang mengalami gizi buruk secara langsung, bukan diberikan secara merata. Dalam unggahannya ia menulis, "Namun kita sepakat masih terdapat anak-anak yang kurang gizi, akan tetapi tidak seperti ini memberantasnya, lebih baik parsial dan tepat sasaran kepada keluarga miskin dan mengalami gizi buruk."



Gambar 2. Unggahan Komentar Positif Platform X Gambar ini menampilkan unggahan dari akun *@ExxaLatifa* dan *@barengwarga* yang mendukung program MBG. *@ExxaLatifa* mengklaim keberhasilan program sebesar 99,99% dengan insiden sangat kecil. Akun *@barengwarga* menekankan bahwa program ini dirancang untuk pencegahan stunting dan tidak sekadar untuk "makan gratis", dengan dana triliunan rupiah yang perlu difokuskan pada nilai gizi, bukan sekadar mengenyangkan.

Namun tidak semua netizen menunjukkan sikap negatif. Beberapa pengguna justru memberikan tanggapan positif. Akun *@ExxaLatifa*, misalnya, memberikan data yang menegaskan keberhasilan program MBG. Dalam cuitannya pada 8 Mei 2025, ia menyatakan, "Perlu dipahami jika tingkat

keberhasilan program makan bergizi gratis mencapai 99,99%, dan telah melayani 3,4 juta penerima manfaat sejak diluncurkan dan jumlah insiden sangat kecil yakni hanya 0,005% dari total penerima manfaat.” Pernyataan ini memperlihatkan bahwa meski ada kritik, program ini telah memiliki capaian yang signifikan dalam pelaksanaan dan penerimaan masyarakat secara luas.

Opini netizen di platform X memperlihatkan pola framing yang mencerminkan ketidakpercayaan terhadap kebijakan publik. Dengan menggunakan teori framing Pan & Kosicki, kita dapat menganalisis bahwa framing negatif terhadap program MBG memiliki struktur sebagai berikut:

1. Sintaksis: Pilihan kata seperti “akal-akalan” dan “tidak bergizi” membentuk opini negatif sejak awal.
2. Skrip: Narasi dibangun seolah-olah ada ketidakwajaran dalam praktik pengadaan, dengan asumsi bahwa program akan dimanfaatkan oleh oknum.
3. Tematik: Kritik difokuskan pada isu anggaran yang besar dan dugaan kualitas makanan yang rendah.
4. Retoris: Tanda tanya, tanda seru, dan istilah seperti “ladang korupsi” digunakan untuk menimbulkan efek emosional yang kuat.

Sementara itu, opini positif juga membentuk framing alternatif:

1. Sintaksis: Menggunakan kata-kata seperti “berhasil”, “data”, dan “pentingnya gizi.”
2. Tematik: Fokus pada tujuan program yaitu pencegahan stunting dan akses nutrisi merata.

Namun, pembacaan opini netizen ini juga harus dilihat dari perspektif sosiologi komunikasi. Ketidakpercayaan masyarakat digital terhadap pemerintah mencerminkan krisis komunikasi dan rendahnya literasi gizi. Relasi kuasa antara narasi elit (pemerintah) dan opini akar rumput (netizen) menjadi tidak seimbang, dan media sosial menjadi medan pertarungan legitimasi kebijakan.

Di sisi lain, pengalaman para siswa penerima manfaat membentuk suatu kontra-narasi yang jarang terdengar dalam ruang digital. Mereka adalah bentuk “silent majority” yang sebenarnya menikmati manfaat langsung dari program, tetapi tidak ikut serta dalam diskursus digital. Realitas ini memperlihatkan jarak antara persepsi daring dan pengalaman nyata di lapangan. Studi ini menunjukkan bahwa media sosial cenderung membentuk persepsi berdasarkan emosi dan ketidakpercayaan, sedangkan pengalaman siswa menawarkan perspektif berbasis kenyataan. Oleh karena itu, kebijakan seperti MBG perlu dikomunikasikan dengan lebih inklusif dan responsif, serta terus dievaluasi berdasarkan pengalaman langsung masyarakat penerima manfaat.

B. Pembahasan

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan oleh pemerintah sebagai salah satu solusi untuk meningkatkan kesehatan dan konsentrasi belajar siswa di sekolah telah menjadi topik perdebatan di ruang publik, terutama di

platform media sosial seperti X (sebelumnya Twitter). Banyak netizen menyuarakan keresahan, kritik, hingga kekhawatiran terhadap keberlangsungan dan pelaksanaan program ini. Isu-isu yang mencuat antara lain adalah besarnya anggaran negara yang dihabiskan untuk program ini, potensi memperkaya pihak ketiga (vendor makanan), asumsi bahwa program ini lebih merepotkan dibandingkan jika bantuan diberikan dalam bentuk uang tunai, serta ketidaksesuaian antara makanan yang disediakan dengan standar gizi seimbang yang seharusnya. Untuk menjawab kontroversi tersebut, penelitian ini membandingkan opini netizen dengan hasil wawancara langsung terhadap siswa yang menjadi sasaran program di beberapa sekolah.

Pertama-tama, isu mengenai anggaran negara menjadi perhatian utama dalam kritik masyarakat. Banyak netizen menilai bahwa program MBG menyedot dana negara dalam jumlah yang sangat besar, sementara kondisi fiskal Indonesia sedang dalam tekanan, ditandai dengan meningkatnya utang negara dan defisit anggaran. Kritik ini juga muncul dari salah satu narasumber siswa, yang menyatakan bahwa “bahkan dana untuk program ini sangat besar di saat krisis hutang negara saat ini,” menunjukkan adanya kekhawatiran dari kalangan penerima manfaat langsung terkait efektivitas dan efisiensi pembiayaan program (Wawancara, Narasumber 1). Dalam konteks teori kebijakan publik, seperti yang dikemukakan oleh Dunn (2003), kebijakan harus dirancang secara rasional dan efisien agar sumber daya yang terbatas dapat digunakan secara optimal. Bila pengeluaran negara untuk MBG tidak dibarengi dengan perencanaan yang matang dan output yang signifikan, maka kebijakan ini rentan dianggap sebagai pemborosan anggaran.

Namun, dari perspektif lain, jika tujuan jangka panjang MBG adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui intervensi gizi sejak dini, maka anggaran yang besar bisa dianggap sebagai investasi. Menurut teori pembangunan manusia oleh Amartya Sen (1999), kesehatan dan pendidikan merupakan dua indikator utama untuk meningkatkan kapabilitas manusia. Oleh karena itu, penyediaan makanan bergizi secara gratis di sekolah bisa berkontribusi terhadap pembangunan jangka panjang. Meski demikian, pengawasan dan transparansi dalam penggunaan anggaran menjadi keharusan agar anggaran tersebut tidak disalahgunakan atau dialihkan.

Isu kedua yang berkembang adalah anggapan bahwa program MBG berpotensi memperkaya pihak ketiga, yaitu para vendor penyedia makanan. Kekhawatiran ini diperkuat dengan sejumlah kasus yang muncul di media, seperti vendor makanan yang belum dibayar, atau munculnya dugaan kerjasama antara pejabat dan pihak swasta dalam pengadaan makanan sekolah. Hal ini juga disinggung oleh narasumber yang menyatakan, “jika ada kecacatan dalam program, pemerintah jangan lepas tangan, misalnya seperti kasus keracunan akibat MBG dan vendor yang tidak dibayar sehingga merugikan vendor” (Wawancara, Narasumber 1). Dalam teori ekonomi politik kebijakan publik, sebagaimana dijelaskan oleh Dye (2013), sering kali kebijakan pemerintah dipengaruhi oleh kepentingan kelompok tertentu, termasuk para

pelaku bisnis yang melihat peluang dari proyek-proyek pemerintah.

Namun, dalam praktiknya, tidak semua vendor mendapat keuntungan besar. Justru dalam beberapa kasus, vendor dirugikan karena pembayaran yang tersendat atau spesifikasi makanan yang diminta tidak sesuai dengan anggaran yang diberikan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengadaan dan kerja sama dengan pihak ketiga perlu diperbaiki agar tidak menimbulkan konflik kepentingan ataupun kerugian finansial. Dalam penelitian ini, wawancara dengan siswa tidak menunjukkan adanya kecenderungan bahwa pihak sekolah atau siswa mengetahui secara detail soal vendor, yang menunjukkan kurangnya transparansi dan sosialisasi mengenai mekanisme program. Selanjutnya, asumsi bahwa program MBG lebih merepotkan dibandingkan jika diberikan dalam bentuk uang tunai juga menjadi salah satu sorotan dari netizen. Banyak pengguna media sosial berargumen bahwa akan lebih efektif jika siswa diberikan subsidi langsung berupa uang saku tambahan untuk membeli makanan yang mereka inginkan. Argumen ini mencerminkan pendekatan efisiensi ekonomi, di mana masyarakat menginginkan fleksibilitas dalam memilih. Namun, pendekatan ini bertentangan dengan tujuan utama program MBG, yaitu menjamin bahwa makanan yang dikonsumsi siswa memiliki standar gizi yang seimbang.

Dari hasil wawancara, terlihat adanya perbedaan pandangan. Seorang siswa menyatakan bahwa “siswa sangat senang karena mereka terbantu dari mulai uang jajan yang seharusnya dipakai buat membeli makanan, bisa disisihkan” (Wawancara, Narasumber 2). Pendapat ini menunjukkan bahwa program MBG dianggap mengurangi beban ekonomi keluarga. Namun, dari sisi pelaksanaan, narasumber lain mengungkapkan bahwa “beberapa kali terjadi keterlambatan saat proses pelaksanaan sehingga mengganggu jam pelajaran” (Wawancara, Narasumber 1). Ini menunjukkan bahwa program ini memang menambah beban administratif dan logistik, baik bagi sekolah maupun siswa. Dalam konteks ini, teori kebijakan publik yang mengedepankan nilai efisiensi dan implementabilitas (Hill & Hupe, 2014) menjadi relevan. Jika sebuah program terlalu merepotkan dalam pelaksanaannya, maka efektivitasnya bisa menurun walaupun niat awalnya baik.

Permasalahan keempat yang menjadi fokus pembahasan adalah ketidaksesuaian makanan yang diberikan dengan standar makanan bergizi seimbang. Salah satu narasumber menyatakan, “kalau sesuai dengan standar gizi sih menurut saya enggak juga ya... bahkan kadang menunya tidak fresh” (Wawancara, Narasumber 1). Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara konsep makan bergizi yang ditargetkan pemerintah dan kenyataan di lapangan. Dalam teori gizi dan kesehatan anak, seperti yang dijelaskan oleh Gibson (2005), asupan makanan yang seimbang sangat penting untuk tumbuh kembang anak. Jika makanan yang diberikan tidak memenuhi standar tersebut, maka tujuan program menjadi tidak tercapai. Bahkan lebih buruk lagi, jika makanan disiapkan tanpa memperhatikan kebersihan dan kualitas, maka dapat menimbulkan dampak negatif seperti keracunan atau penurunan kesehatan siswa.

Namun demikian, narasumber lain memberikan pandangan yang berbeda,

menyatakan bahwa “menu-nya pas sekali, ada lauk, sayur, nasi dan buah/puding” (Wawancara, Narasumber 2). Ketidakkonsistenan ini mungkin mencerminkan perbedaan kualitas pelaksanaan antar sekolah, yang menunjukkan pentingnya adanya standar nasional dan pengawasan mutu makanan yang ketat. Di sinilah letak tantangan dalam pelaksanaan kebijakan publik berskala nasional di negara kepulauan seperti Indonesia. Variasi sumber daya lokal, kapasitas sekolah, dan ketersediaan vendor menjadi faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi.

Dalam metodologi penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus dan wawancara mendalam kepada siswa sebagai partisipan langsung dari program MBG. Teknik ini memungkinkan eksplorasi lebih dalam terhadap pengalaman subjektif siswa dan memberikan gambaran nyata tentang bagaimana kebijakan ini berdampak di tingkat akar rumput. Dari ketiga narasumber yang diwawancarai, dua memberikan tanggapan positif, menyatakan bahwa program membantu siswa dalam memenuhi kebutuhan makan siang, mengurangi beban keuangan, dan meningkatkan semangat belajar. Namun, satu narasumber memberikan penilaian lebih kritis, menekankan perlunya perbaikan desain dan implementasi program agar tepat sasaran dan berkelanjutan.

Jika dibandingkan dengan opini netizen yang cenderung negatif dan sinis terhadap MBG, maka ditemukan adanya gap antara persepsi masyarakat umum dan pengalaman penerima manfaat. Hal ini mengindikasikan bahwa persepsi publik tidak selalu mencerminkan kenyataan di lapangan, atau sebaliknya, bahwa suara-suara yang kritis mungkin merupakan cerminan dari kekhawatiran terhadap ketidakefisienan sistem pemerintahan secara umum. Dalam teori framing yang digunakan dalam kajian ini, opini netizen di platform X cenderung membingkai MBG sebagai program politis, penuh pemborosan, dan rentan korupsi. Sementara itu, narasi dari siswa lebih beragam, tergantung pada konteks sekolah masing-masing. Dari keseluruhan hasil dan pembahasan, tampak bahwa program MBG adalah kebijakan yang memiliki potensi besar tetapi masih menghadapi berbagai tantangan dalam implementasi. Diperlukan perbaikan dalam aspek transparansi anggaran, pengawasan kualitas makanan, efisiensi pelaksanaan, dan pemerataan antar daerah. Pemerintah juga perlu membuka ruang partisipasi masyarakat dalam evaluasi program serta memperhatikan masukan dari sekolah dan siswa. Sejalan dengan pemikiran Grindle (1980) tentang implementasi kebijakan publik, keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh kebijakan di atas kertas, tetapi juga oleh kapasitas pelaksana, konteks lokal, serta mekanisme monitoring dan evaluasi.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi topik yang memicu perdebatan luas di ruang publik digital, terutama di platform media sosial X. Melalui metode analisis isi dan wawancara mendalam, ditemukan adanya ketimpangan antara framing opini publik daring yang cenderung negatif dan pengalaman empiris siswa sebagai penerima manfaat langsung. Pembahasan ini akan mengupas fenomena tersebut dalam bingkai teori framing Pan & Kosicki

(1993), teori komunikasi sosiologis, serta implikasinya terhadap komunikasi kebijakan publik.

Framing Netizen: Pola Kritik yang Terstruktur

Framing netizen terhadap MBG umumnya dibangun melalui struktur-struktur retorik dan tematik yang kuat. Analisis terhadap sejumlah unggahan di X menunjukkan bahwa opini negatif disusun dengan elemen framing berikut:

1. Sintaksis: Penggunaan kata-kata bernada tuduhan seperti *“akal-akalan politik,” “proyek ambisius,”* atau *“mubazir”* menjadi penanda sintaksis yang memosisikan MBG sebagai objek kecurigaan.
2. Skrip: Banyak unggahan mengikuti narasi berulang, yakni skenario korupsi proyek pemerintah. Contoh: *“Ujung-ujungnya vendor belum dibayar, kayak bansos zaman dulu.”*
3. Tematik: Topik dominan adalah anggaran jumbo, dugaan korupsi, dan mutu makanan. Ini menciptakan struktur tematik bahwa MBG adalah proyek elitis yang minim kontrol.
4. Retoris: Banyak unggahan memakai tanda seru, pertanyaan retorik (*“Mau anak kenyang atau pejabat kenyang?”*), serta metafora seperti *“ladang basah korupsi.”* Elemen ini memperkuat emosi dan keterlibatan publik.

Framing tersebut terbukti efektif mempengaruhi opini publik karena sesuai dengan pola distrust masyarakat terhadap institusi. Dalam teori komunikasi sosiologis, fenomena ini mencerminkan relasi kekuasaan yang timpang antara negara dan warga digital. Seperti yang diutarakan Castells (2012), ruang digital memungkinkan terbentuknya “komunitas afektif” yang menyebarkan opini berdasarkan emosi ketimbang fakta, terutama saat literasi digital dan literasi kebijakan masih rendah.

Kontra-Narasi dari Siswa: Framing Empiris yang Terpinggirkan

Di sisi lain, narasi yang muncul dari wawancara siswa justru menunjukkan spektrum yang lebih luas dan nuansa yang lebih realistis. Misalnya:

1. Beberapa siswa mengapresiasi keberadaan MBG karena mengurangi beban ekonomi keluarga dan membantu konsentrasi belajar: *“Sangat membantu, uang jajan bisa disisihkan”* (Narasumber 2).
2. Namun ada pula catatan kritis, seperti keterlambatan logistik dan menu yang tidak fresh: *“Kadang menunya nggak sesuai standar gizi”* (Narasumber 1).

Jika dilihat dalam struktur framing Pan & Kosicki, framing siswa lebih bersifat deskriptif dan tidak mengandung intensi persuasi tinggi seperti framing netizen. Artinya, framing siswa tidak dikonstruksi untuk viralitas, tetapi lahir dari pengalaman otentik. Hal ini menjadikan mereka sebagai silent majority yang terpinggirkan dari narasi digital. Suara mereka tidak tampil dalam trending topic, tetapi justru merepresentasikan realitas akar rumput yang kerap diabaikan. Ketiadaan narasi siswa dalam diskursus digital mengindikasikan ketimpangan komunikasi publik, di mana yang lebih terdengar adalah suara vokal netizen, bukan penerima manfaat langsung. Padahal, jika ruang digital dapat membuka

kanal partisipasi langsung dari siswa, maka framing publik akan lebih seimbang.

Antara Distrust dan Krisis Komunikasi

Opini negatif netizen terhadap MBG juga menunjukkan krisis komunikasi yang lebih dalam antara negara dan masyarakat digital. Dalam konteks ini, distrust terhadap pemerintah, minimnya transparansi anggaran, serta pengalaman buruk dari program sebelumnya (bansos, proyek sekolah, dll.) memperkuat prasangka negatif. Seperti disebutkan oleh Jansen (2012), komunikasi kebijakan yang gagal menjangkau warga digital akan menciptakan kondisi “information vacuum,” yang kemudian diisi oleh noise, rumor, dan framing oposisi.

Lebih jauh, rendahnya literasi gizi masyarakat turut menjadi penyebab mengapa banyak netizen menyarankan agar bantuan diberikan dalam bentuk uang tunai. Mereka gagal memahami bahwa uang belum tentu menghasilkan konsumsi gizi yang lebih baik. Hal ini memperlihatkan bahwa framing di ruang digital tidak hanya membentuk opini, tetapi juga mencerminkan kelemahan pemahaman publik terhadap tujuan kebijakan.

Analisis Konseptual dan Sintesis Akhir

Secara konseptual, penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat dua dunia yang berbeda: dunia hiperrealitas digital yang dibentuk oleh framing negatif netizen, dan dunia empirik di sekolah yang bersifat beragam dan kontekstual. Konsep hiperrealitas dari Baudrillard (1981) menjadi relevan untuk membaca fenomena ini. Netizen merepresentasikan realitas MBG bukan berdasarkan pengalaman langsung, tetapi berdasarkan konstruksi digital yang diperkuat algoritma dan emosi kolektif.

Sementara itu, pengalaman siswa justru memperlihatkan bahwa MBG memiliki potensi manfaat besar, meskipun pelaksanaannya perlu evaluasi berkelanjutan. Dengan kata lain, framing publik tidak selalu mencerminkan realitas kebijakan, dan di sinilah pentingnya riset lapangan sebagai koreksi terhadap narasi digital.

Dalam kerangka teori kebijakan publik (Grindle, 1980), keberhasilan program MBG tidak hanya tergantung pada desain kebijakan, tetapi pada bagaimana kebijakan tersebut diterjemahkan dalam praktik oleh pelaksana di lapangan, serta sejauh mana ruang partisipasi masyarakat dibuka untuk evaluasi. Penelitian ini menegaskan pentingnya mengintegrasikan komunikasi digital dan komunikasi akar rumput dalam penyusunan dan evaluasi kebijakan publik.

IV KESIMPULAN

Penelitian ini menganalisis bagaimana framing netizen di platform X terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berkontribusi membentuk opini publik yang didominasi narasi negatif, mencakup isu pemborosan anggaran, potensi keuntungan pihak ketiga, efektivitas teknis, dan kualitas gizi makanan. Sebaliknya, wawancara dengan siswa sebagai penerima manfaat menunjukkan

pengalaman yang lebih beragam dan cenderung positif, terutama dalam hal manfaat ekonomi dan dukungan terhadap aktivitas belajar, meskipun tetap ditemukan kritik terkait pelaksanaan teknis dan mutu makanan. Melalui pendekatan teori framing Pan & Kosicki, ditemukan bahwa struktur sintaksis, tematik, retorik, dan skrip dalam framing netizen membentuk narasi hiperrealitas yang tidak selalu sesuai dengan pengalaman di lapangan. Siswa yang menjadi penerima manfaat justru memunculkan kontra-narasi sebagai representasi dari suara publik akar rumput yang kurang terdengar di ruang digital. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara persepsi daring yang dibentuk oleh framing media sosial dan realitas faktual di tingkat pelaksana program. Secara akademik, studi ini memperkaya literatur tentang framing digital dengan mengintegrasikan analisis struktur framing Pan & Kosicki dalam konteks kebijakan publik berbasis intervensi sosial. Selain itu, penelitian ini menyoroti pentingnya mendengar suara kelompok penerima manfaat langsung sebagai bagian dari kajian komunikasi kebijakan, bukan semata-mata mengandalkan narasi populer di media sosial. Secara praktis, temuan ini memberikan masukan strategis bagi pemerintah dalam merancang komunikasi publik yang lebih responsif terhadap persepsi daring. Pemerintah perlu membangun narasi kebijakan yang berbasis data lapangan, memperkuat transparansi pelaksanaan program, dan melibatkan aktor-aktor lokal (seperti sekolah dan siswa) dalam proses evaluasi dan sosialisasi kebijakan. Dengan mengintegrasikan komunikasi digital dan komunikasi tatap muka, program seperti MBG dapat memperoleh legitimasi yang lebih luas serta mengurangi kesenjangan persepsi antara publik daring dan realitas empiris. Dengan demikian, studi ini menegaskan bahwa framing netizen bersifat interpretatif dan tidak selalu merepresentasikan pengalaman empiris. Pendekatan komunikasi publik ke depan perlu memadukan analisis wacana digital dengan realitas partisipatif di tingkat akar rumput agar kebijakan sosial dapat diterima secara lebih utuh dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arikunto, S. (2006). *Data penelitian deskriptif*. Management Penelitian Analisis, 59, 262–296.
- Harahap, N. (2020). *Metodologi penelitian kualitatif*. Medan: Wal Ashri Publishing.
- Koyan, P. D. I. W. (2022). *Metodologi penelitian kualitatif*. Rake Sarasin.
- Widiawati, N. (2020). *Metodologi penelitian: Komunikasi dan penyiaran Islam*. Edu Publisher.

Artikel Jurnal

- Aneta, A., Yuliyani Solihin, D. I., Aneta, Y., Podungge, A. M., Podungge, A. W. & Hunawa, R (2025). Problematics of State Civil Apparatus Productivity Towards Bureaucracy Streamliness. *Hulondalo Jurnal Ilmu Pemerintahan*

- Dan Ilmu Komunikasi*, 4(1), 314–329 <https://doi.org/10.59713/jipik.v4i1.1163>
- Aisyah, E., & Suratnoaji, C. . (2025). Framing Analysis of the 2024 Election in the Documentary Film “Dirty Vote”. *Hulondalo Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Ilmu Komunikasi*, 4(1), 168–182. <https://doi.org/10.59713/jipik.v4i1.1130>
- Dewantara, A. S. (2025). The Commodification Of Poverty In Giveaway Content On The Tiktok Account @WillieSalim. *Hulondalo Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Ilmu Komunikasi*, 4(1), 97–115. <https://doi.org/10.59713/jipik.v4i1.1040>
- Entman, R. M. (1993). Framing: Toward clarification of a fractured paradigm. *Journal of Communication*, 43(4), 51–58. <https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.1993.tb01304.x>
- Febria, C., Nugrahmi, M. A., & Mariyona, K. (2023). Edukasi aksi bergizi upaya pencegahan anemia pada remaja. *MONSU’ANI TANO: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(2). <https://doi.org/10.32529/tano.v6i2.2896>
- Febrianti, I., Ayumi, M., Panjaitan, A., & Manurung, A. S. (2025). Peran komunikasi interpersonal dalam membangun identitas dan budaya organisasi. *RISOMA: Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Pendidikan*, 3(1), 60–70.
- Fauzani, M. R., Utami, R., & Aeni, T. (2025). The Role of TikTok Features on Enhancing the Addiction of Content Consumption among Users. *Hulondalo Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Ilmu Komunikasi*, 4(1), 39–54. <https://doi.org/10.59713/jipik.v4i1.1021>
- Harahap, N., & Aqtari, W. D. (2024). Content analysis of Quora social media content regarding the issues of husband-wife divorce. *International Journal of Health, Education & Social (IJHES)*, 7(3), 1–14.
- Harahap, N., Kembaren, M. M., & Harahap, E. W. (2024). Islam and state ideology: Masyumi’s experience in Indonesian politics. *Journal of Law and Sustainable Development*, 12(2), e3111. <https://doi.org/10.55945/jlsd.v12i2.3111>
- Kim, H., & Lee, J. (2019). Public support for free school meal programs in South Korea: The role of transparency and political affiliation. *Asian Journal of Public Administration*, 10(4), 300–320. <https://doi.org/10.1080/23276665.2019.1684786>
- Linuwih, R. A., Sarjono, H. S., & Aji, H. K. (2024). Analisis framing pemberitaan Ganjar Pranowo terkait penolakan terhadap keikutsertaan timnas Israel dalam Piala Dunia U20 Indonesia. *Solidaritas: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 8(1).
- Manurung, A. S., & Pohan, S. (2024). Pengaruh kualitas pelayanan publik dan citra institusi terhadap kepuasan mahasiswa Ilmu Komunikasi UIN Sumatera Utara yang berdampak pada word of mouth. *Jurnal Peurawi: Media Kajian Komunikasi Islam*, 7(1), 129–146.
- Manurung, A. S., & Manurung, P. (2024). Tourism communication strategy in

- developing halal tourism in the Lake Toba tourism area of North Sumatra. *Jurnal Nomosleca*, 10(1), 128–142.
- Manurung, A. S., & Alfikri, M. (2021). Komunikasi interpersonal terhadap penggunaan media sosial di kalangan mahasiswa Ilmu Komunikasi UIN Sumatera Utara. *Algebra: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Sains*, 1(4), 1–8.
- Mayasari, I., Shaleha, D., & Manurung, A. S. (2025). Peran komunikasi interpersonal dalam menciptakan keharmonisan antar guru dalam lingkungan kerja. *ALFIHRIS: Jurnal Inspirasi Pendidikan*, 3(1), 76–84.
- Meraz, S. (2011). Using time series analysis to measure intermedia agenda-setting influence in traditional media and political blog networks. *Journal of Communication*, 61(1), 21–39. <https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.2010.01528.x>
- Morgan, L., & Taylor, P. (2018). Free school meals and public perception: An analysis of media representation in the UK. *British Journal of Public Policy*, 15(3), 200–215.
- Nugroho, A., & Santoso, B. (2020). Opini publik dan media sosial: Pengaruh framing dalam persepsi kebijakan pemerintah. *Jurnal Komunikasi Publik*, 12(1), 45–60.
- Nurfauziyah, J., Pramiyanti, A., & Pasaribu, A. L. (2024). Victim blaming pada perempuan sebagai korban non-consensual dissemination of intimate images (Analisis framing kasus Rebecca Klopper pada Detik.com dan Tribunnews.com). *eProceedings of Management*, 11(6).
- Purba, S. A., Lubis, R. R., Bagas, M., Fasya, M. H., Fatullah, D., & Harahap, N. (2024). Pengaruh penggunaan media sosial terhadap perkembangan kemampuan komunikasi orang tua dan anak. *Journal of Social Science and Humanities*, 3(1), 25–30.
- Putri, S. A., Pohan, S., & Nasution, C. R. (2025). The Effect of Somethinc Product Review on TikTok on Brand Awareness in Medan City. *Hulondalo Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Ilmu Komunikasi*, 4(1), 74–86. <https://doi.org/10.59713/jipik.v4i1.1138>
- Rahmawati, D., & Hidayat, R. (2021). Dinamika framing media sosial terhadap program sosial pemerintah: Studi kasus program bantuan sosial di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 8(2), 88–105.
- Saragih, M. Y. (2024). Transformasi media TikTok sebagai ruang baru jurnalistik adaptasi media tradisional terhadap tren digital. *eScience Humanity Journal*, 5(1), 297–305.
- Saragih, M. Y. (2024). Burning the “flag of tawhid”: Ex-HTI ideology framing in journalistic production of Media Umat (MU). *An-Natiq: Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, 4(2), 251–262.
- Saragih, M. Y. Y. (2024). Strategi komunikasi mahasiswa Ilmu Komunikasi UIN Sumut-Medan dalam menyikapi toxic relationship pada era digitalisasi jurnalistik online. *Promedia (Public Relation dan Media Komunikasi)*, 10(1).
- Saragih, M. Y. (2023). The urgency and challenges of female journalists in the era of the industrial revolution 4.0 in Indonesia. *Journal of Gender and*

Social Inclusion in Muslim Societies, 4(1), 11–22.

Suryasuciramdhan, A., Meliasari, M., Ifada, B. M., & Faidh, M. A. (2024). Analisis framing dalam kasus penyalahgunaan KIP Kuliah mahasiswi Universitas Diponegoro di media sosial X dan media online Kompas.tv. *Journal of Creative Student Research*, 2(3), 40–51.

Thalib, M. A. (2022). Pelatihan teknik pengumpulan data dalam metode kualitatif untuk riset akuntansi budaya. *Seandanan: Jurnal Pengabdian pada Masyarakat*, 2(1). <https://doi.org/10.23960/seandanan.v2i1.29>

Sumber Web

UNICEF. (2021). *Program gizi remaja aksi bergizi: Dari kabupaten percontohan menuju perluasan nasional*. <https://www.unicef.org/indonesia/id/laporan/program-gizi-remaja-aksi-bergizi>